SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK – PENYELENGGARAAN
2021

PERMENDAG NO. 39, BN 2021/NO. 732, 46 HLM.

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK

ABSTRAK : - bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta dapat menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya, serta berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sesuai dengan ketentuan Pasal 60 Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD RI Tahun 1945; UU No. 39 Tahun 2008; Perpres No. 95 Tahun 2018; PERMENKOMINFO No. 5 Tahun 2015; PERMENPANRB No. 5 Tahun 2020; PERMENPANRB No. 59 Tahun 2020; PERMENDAG No. 80 Tahun 2020.
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang: Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna sistem pemerintahan berbasis elektronik; SPBE Kementerian Perdagangan dilaksanakan dengan prinsip efektivitas, keterpaduan, kesinambungan, efisiensi, akuntabilitas, interoperabilitas, dan keamanan; Tata kelola SPBE pada tingkat Kementerian Perdagangan disusun dan dikoordinasikan oleh PDSI sebagai unit TIK pusat; Pelaksanaan Manajemen SPBE mengacu pada standar yang berlaku secara nasional dan/atau internasional; Audit TIK dilaksanakan untuk memastikan keandalan dan keamanan sistem TIK yang terdiri atas audit infrastruktur SPBE, audit aplikasi SPBE, dan audit keamanan SPBE; Untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, dan Audit TIK, serta pemantauan dan evaluasi SPBE dibentuk Penyelenggara SPBE Kementerian Perdagangan yang terdiri atas Tim Koordinasi SPBE dan Tim Asesor Internal SPBE ditetapkan dengan Keputusan Menteri; Guna mengukur kemajuan dan meningkatkan kualitas SPBE di Kementerian Perdagangan, Tim Asesor Internal melaksanakan pemantauan dan evaluasi SPBE yang mencakup kebijakan internal SPBE, tata kelola SPBE, manajemen SPBE, dan layanan SPBE paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dalam bentuk penilaian mandiri SPBE; Hasil pemantauan dan evaluasi SPBE dilaporkan kepada Tim Koordinasi SPBE.

- CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 28 Juni 2021 dan ditetapkan pada tanggal 18 Juni 2021.
- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-DAG/PER/7/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 971), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Lampiran : 6 hlm.